



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Iskandar Ahmaddien
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 420254

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 845.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJAR , HASIL SENDIRI Rp. 405.000.000
2. Bangunan Seluas 26 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 575.000.000

1. MOBIL, HONDA CITY VTECH Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOBIL, NISSAN MARCH MARCH Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. MOBIL, TOYOTA VELOZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
4. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
5. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 91.708.397

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.536.708.397



III. HUTANG

Rp. 436.100.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.100.608.397

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.